

KINERJA USAHA KOPERASI MELALUI PENDEKATAN TINGKAT KESEHATAN KAITANNYA DENGAN PENCIPTAAN VALUE OF FIRM

Rima Elya Dasuki

Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung

Jawa Barat, Indonesia

Email: rimadasuki@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan/Pembiayaan yang bergerak di sektor jasa keuangan secara de facto telah tumbuh dan berkembang pesat di seluruh wilayah nusantara dan mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam menopang seluruh kegiatan ekonomi produktif sektor riil. Mengingat kegiatan usaha KSP/USP-Koperasi salah satunya adalah menghimpun dana masyarakat, tentunya membawa konsekuensi bahwa pengelolaan KSP/USP-Koperasi harus ditangani secara sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent). Untuk menjaga dan melindungi tingkat kepercayaan publik kepada KSP/USP-Koperasi dari salah urus atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, maka dalam anggaran dasar KSP/USP-Koperasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang harus dilaksanakan oleh KSP/USP-Koperasi sendiri secara teratur. Kesehatan koperasi akan sangat mempengaruhi value of firm koperasi dan manfaat yang akan diterima anggota. Kajian ini merupakan tahap awal untuk pelaksanaan penelitian kinerja usaha koperasi melalui pendekatan tingkat kesehatan kaitannya dengan penciptaan value of firm dan share holder equity yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti tahun anggaran 2018.

Kata Kunci : Kesehatan Koperasi, Kinerja Usaha, Value of Firm

ABSTRACT

Savings and Loans Cooperative which is one of the Financial Institutions / Financing which is engaged in the financial services sector de facto has grown and developed rapidly throughout the archipelago and has a central and strategic position in supporting all productive sector productive economic activities. Considering the KSP / USP-Koperasi business activities, one of them is collecting public funds, of course, bringing the consequences that the management of KSP / USP-Koperasi must be handled in a healthy manner by considering the prudent principle. To safeguard and protect the level of public confidence in the KSP / USP-Koperasi from mismanagement or the possibility of possible deviations, KSP / USP-Koperasi or Regency / City Government must monitor and apply an Internal Control System (SPI) which must be implemented by KSP / USP-Koperasi itself on a regular basis. The health of the cooperative will greatly affect the value of the firm's co-operative and the benefits that the member will receive. This study is an early stage for conducting cooperative business performance research through health level approach in relation to the creation of value of firm and share holder equity, financed by Kemenristek Dikti fiscal year 2018.

Keywords: Business Performance, Health Cooperative, Value of Firm

PENDAHULUAN

Hasil akhir penilaian kondisi Koperasi simpan pinjam dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang, sedangkan bagi badan pengawas dalam hal ini Kementerian Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah antara lain digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan. (Sujono, 2007)

Untuk menjaga dan melindungi tingkat kepercayaan publik kepada Koperasi simpan pinjam dari salah urus atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang harus dilaksanakan oleh Koperasi simpan pinjam sendiri secara teratur, antara lain dengan melakukan “*penilaian kesehatan*” (Kementerian KUKM, 2016) yang bertujuan sebagai berikut:

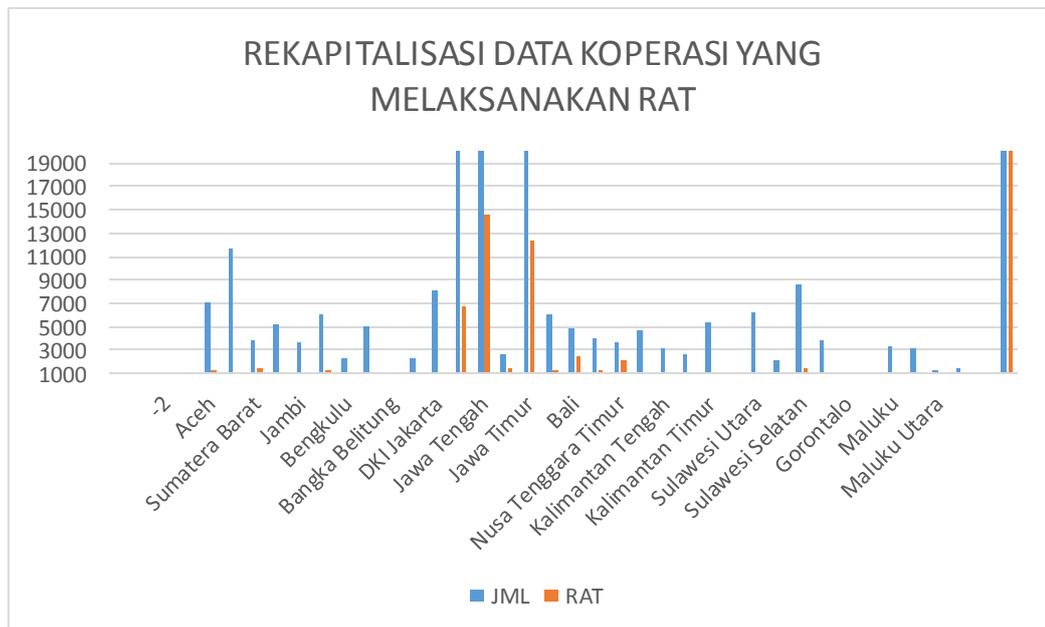
1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat.
2. Mengetahui posisi hasil/prestasi kinerja Koperasi simpan pinjam .
3. Melindungi harta kekayaan Koperasi simpan pinjam konvensional dan berbasis syariah dan Penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan Koperasi simpan pinjam konvensional dan berbasis syariah pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelolanya.

Tabel 1. Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Indonesia

No	Propinsi/DI	Koperasi (unit)	
		Aktif	Tidak Aktif
1	Aceh	4,490	2,617
2	Sumatera Utara	6,285	5,411
3	Sumatera Barat	2,723	1,169
4	Riau	3,051	2,134
5	Jambi	2,263	1,490
6	Sumatera Selatan	4,450	1,542
7	Bengkulu	1,709	620
8	Lampung	2,760	2,335
9	Bangka Belitung	812	291
10	Kepulauan Riau	1,125	1,183
11	DKI Jakarta	6,016	2,008
12	Jawa Barat	6,855	8,886
13	Jawa Tengah	3,059	5,168
14	DI Yogyakarta	2,369	316
15	Jawa Timur	7,472	3,710
16	Banten	4,168	1,974
17	Bali	4,327	580
18	Nusa Tenggara Barat	2,385	1,664
19	Nusa Tenggara Timur	3,394	313

No	Propinsi/DI	Koperasi (unit)	
		Aktif	Tidak Aktif
20	Kalimantan Barat	2,944	1,672
21	Kalimantan Tengah	2,405	773
22	Kalimantan Selatan	1,769	813
23	Kalimantan Timur	3,501	1,906
24	Kalimantan Utara	512	294
25	Sulawesi Utara	2,927	3,346
26	Sulawesi Tengah	1,495	718
27	Sulawesi Selatan	5,404	3,271
28	Sulawesi Tenggara	2,697	1,097
29	Gorontalo	644	535
30	Sulawesi Barat	735	301
31	Maluku	2,418	834
32	Papua	1,711	1,425
33	Maluku Utara	640	710
34	Papua Barat	708	806
	Jumlah Nasional	50,223	61,912

Sumber : Kementerian KUKM 2017



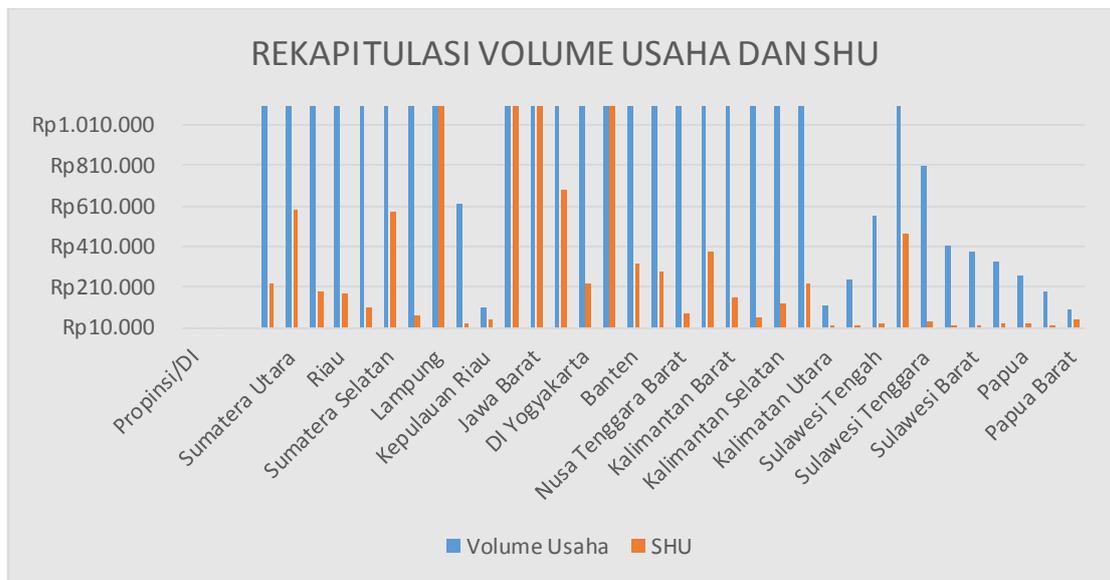
Gambar 1. Pelaksanaan RAT di Indonesia

Berdasarkan data di atas, tergambar bahwa kinerja koperasi di Indonesia masih perlu pembinaan yang lebih baik, sesuai kebutuhan koperasi dengan didasarkan kepada hasil evaluasi kinerja keuangan melalui pendekatan kesehatan koperasi.

PENDEKATAN MASALAH

Pengawasan Koperasi

Praktik bisnis koperasi didasarkan atas nilai dan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan pada kegiatan bisnis segenap pelaku ekonomi (Koperasi, BUMN, BUMS) maupun kebijakannya. Praktik berkoperasi menerapkan skala ekonomi dan lingkup untuk mencapai efisiensi ekonomi dan efisiensi sosial (kolektif). Koperasi berkontribusi nyata dan besar pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pengurangan pengangguran, dan sumbangan pada nilai tambah ekonomi. Namun pada praktiknya bisnis koperasi masih memerlukan perhatian karena produktifitas koperasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Berikut data gambaran kegiatan usaha koperasi di Indonesia:



Gambar 2. Rekapitulasi Volume Usaha dan SHU

Untuk mewujudkan keadaan koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, salah satu instrumen yang penting keberfungsian adalah “pengawasan”. Dalam hal pengawasan terhadap Koperasi, khususnya terhadap Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dewasa ini terdapat sejumlah permasalahan, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Regulasi terkait dengan Pengawasan belum tersosialisasikan secara baik dan berkelanjutan.
2. Belum adanya kelembagaan yang berfungsi menjalankan tugas “menteri” di bidang pengawasan.
3. Belum jelasnya pembagian kewenangan dengan kedeputian yang menerbitkan Badan Hukum (BH) koperasi dengan kedeputian yang melaksanakan pengawasan.
4. Belum adanya aparat pegawai negeri sipil sebagai tenaga fungsional yang ditugaskan sebagai pengawas, baik di pusat maupun di daerah.
5. Belum terciptanya kesatuan tafsir dalam hal pemaknaan, unsur-unsur dan cakupan pengawasan.

Tujuan Pengawasan Koperasi yang dituangkan dalam Permen KUKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, yang diatur dalam Pasal 2 Permen KUKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Kinerja Keuangan Koperasi Berdasarkan Pendekatan Kesehatan Koperasi

Kinerja (*performance*) merupakan cerminan keberhasilan dalam usaha bisnis. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Kamran, 2010), digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Untuk mengukur kinerja keuangan dari perusahaan Koperasi, terutama Koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam, akan mengacu pada ukuran kinerja kesehatan usaha simpan pinjam (Permen KUKM, 2016). Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

A. Permodalan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 pasal 41 ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan Koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tabel 4. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

B. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan.

1. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 5. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	100	10	10,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan
 Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - a. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{\{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)\}}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Tabel 6. Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah
 Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 4) Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan
 Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
<21	100	5	5,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

C. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dijelaskan dalam tabel dibawah ini

1) Manajemen Umum

Tabel 9. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Manajemen Permodalan

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

4) Manajemen Aktiva

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

D. Penilaian Efisiensi

1) Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto

Beban operasi anggota terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas usaha Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok

Tabel 14. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio efisiensi pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
<5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

E. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1) Pengukuran rasio kas bank terhadap kewajiban lancar

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x < 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
>20	25	10	2,5

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 30	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

F. Kemandirian dan Pertumbuhan

Pengertian kemandirian didalam koperasi adalah koperasi harus dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain dan dalam menjalankan usahanya dilandasi pada kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional.

1) Rasio rentabilitas aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 19. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio rentabilitas modal sendiri

Tabel 20. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio kemandirian operasional pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Sedangkan beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari anggota.

Tabel 21. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
>100	100	4	4

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

G. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jatidiri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang ditetapkan sebagai berikut

Tabel 22. Standar perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016

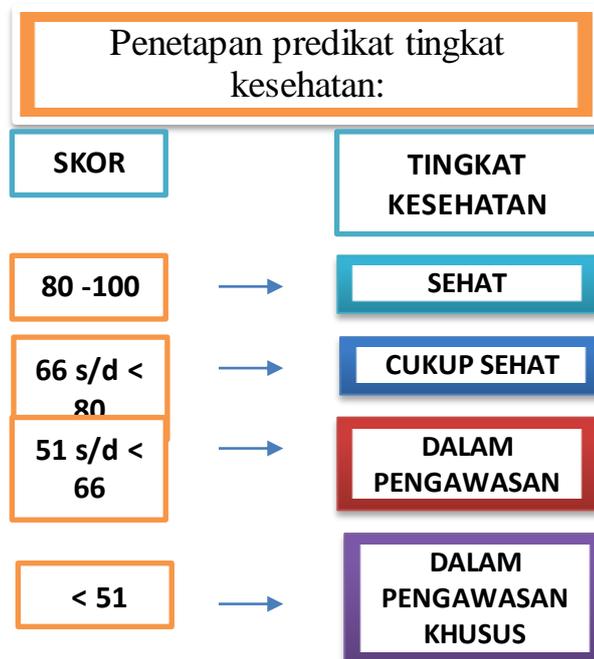
2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,00
$5 \leq x < 7.5$	50	3	1,50
$7.5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Perdep Bidang Pengawasan No 06/Per/Dep.6/IV/2016



Gambar 3. Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi

2.1.3. Value Firm Koperasi

Tujuan koperasi adalah unsur manfaat, yaitu memenuhi kepentingan-kepentingan para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk mencapai hal ini, walaupun koperasi bukan sebagai organisasi perkumpulan modal yang berorientasi profit, namun modal merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan tadi disamping faktor sumber daya lainnya. (Heiko, 2007)

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu terhadap hasil-hasil dari berbagai kegiatan koperasi, Hanel (1990) membedakan tiga jenis efisiensi dalam koperasi yaitu:

1. Efisiensi Pengelolaan Usaha
2. Efisiensi yang Berkaitan Dengan Pembangunan
3. Efisiensi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Para Anggota

Yuyun Wirasmita (2005) menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan usaha koperasi tidak semata-mata dengan ukuran efisiensi koperasi sebagai perusahaan, akan tetapi dengan ukuran efisiensi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dengan dampak-dampaknya yang bersifat sosial. Sedangkan Ibnu Soejono (2007), menyatakan bahwa cara untuk menuju kepuasan anggota koperasi dapat dilihat dari dua sudut yaitu:

1. Keberhasilan Koperasi dari Sudut Perusahaan
2. Keberhasilan Koperasi dari Sudut Efek Koperasi

Röpke (2003) menyatakan bahwa: “*Konsep keberhasilan usaha pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif*”. Dalam konteks koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi, maka keberhasilan usaha koperasi pada umumnya dapat diukur dengan *Sisa Hasil Usaha (SHU)*.

Manfaat koperasi yang tercermin dari tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota baik dalam tataran ekonomi maupun sosial (Pollit, 2007). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota. SHU sendiri dibagikan kepada para anggota koperasi berdasarkan kesepakatan anggota yang biasanya terakumulasi dari penghitungan jasa kepada koperasi (Tuccilo, 2007).

Selain SHU, masih banyak keuntungan lain yang diberikan koperasi kepada anggotanya terutama dalam bidang keuangan. Pada dasarnya keuntungan yang didapatkan anggota dari koperasi adalah manfaat harga. *Value of firm* dapat dilihat dari posisi kekayaan, kewajiban dan equity koperasi dan rasio rasio pengukurannya yang berkaitan dengan profitabilitas

Analisis kinerja usaha dalam penciptaan value of firm

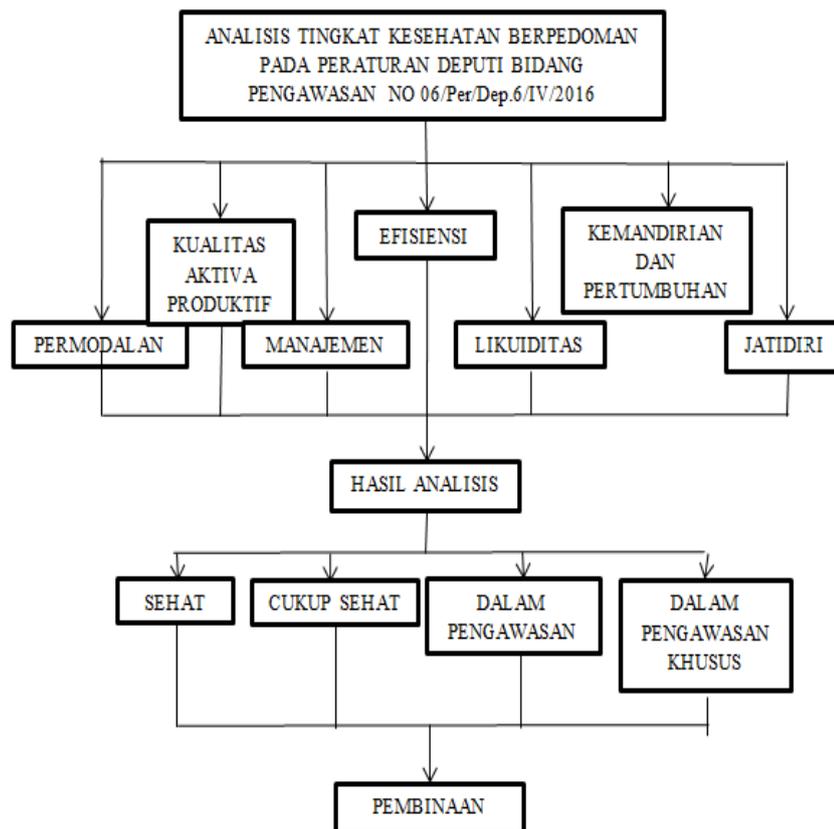
Kinerja (*performance*) merupakan cerminan keberhasilan dalam usaha bisnis. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Anthony, Kaplan, and Young (1997), digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota artinya koperasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota diperlukan beberapa prasyarat. Menurut Yuyun Wirasmita (2005) salah satunya adalah koperasi harus menciptakan “*Cooperative Effect*” (dampak koperasi). *Cooperative Effect* adalah manfaat yang diperoleh anggota, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat tersebut diperoleh karena efisiensi yang diciptakan oleh koperasi, yaitu melalui tindakan bersama (*Joint Action*), yang menghasilkan sinergi, atau skala ekonomis yang antara lain terdiri dari “*Real Economies*” dan “*Pecuniary Economies*”. *Real Economies* misalnya penurunan biaya, penurunan risiko, pengurangan biaya transaksi, peningkatan posisi tawar, sedangkan dampak koperasi yang berupa “*Pecuniary Economies*” antara lain fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh koperasi seperti potongan harga, keringanan tingkat suku bunga pinjaman dan lain-lain. Dampak “*Real Economies*” dan “*Pecuniary Economies*”

merupakan perbedaan manfaat antara berkoperasi dan tidak berkoperasi, yang akan berdampak pada kesejahteraan anggota. (Yuyun Wirasmita, 2005)

1. Koperasi Simpan Pinjam paling sesuai dengan karakteristik koperasi, yaitu “*self help*” (dapat menolong dirinya sendiri), “*self reliance*” (percaya diri), “*self responsibility*” (bertanggung jawab pada dirinya sendiri) dan solidaritas. Ada dua faktor yang mendorong tercapainya dampak koperasi yaitu motivasi anggota untuk meminjam dan motivasi penyimpanan.
2. Motivasi anggota untuk menyimpan akan berpengaruh terhadap *average cost* dan tingkat pendapatan koperasi, namun pada penelitian ini bertambahnya simpanan tidak menyebabkan berkurangnya biaya, hal ini disebabkan masih tingginya biaya operasional yang akan menyebabkan berkurangnya sisa hasil usaha dan akan berdampak pada perolehan *return on asset*
3. Motivasi anggota untuk meminjam di koperasi lebih besar dari motivasi anggota untuk menyimpan yang digambarkan oleh tingginya anggota meminjam diikuti oleh kenaikan *average net revenue (ANR)* sampai tingkat optimal dan kemudian jika jumlah pinjaman bertambah terus maka *average net revenue* akan menurun. Pada Koperasi dengan skala usaha mikro, skala usaha kecil maupun skala usaha menengah kenaikan jumlah pinjaman yang dilakukan oleh anggota memberikan dampak positif terhadap perolehan pendapatan dan menghasilkan kenaikan *return on asset (ROA)*, Hal ini menggambarkan bahwa model teori koperasi simpan pinjam dapat diaplikasikan dimana pada sebagian besar koperasi “*cooperative effect*” belum sesuai dengan yang diharapkan karena anggota masih belum merasakan penurunan biaya operasional yang berdampak beban bunga pinjaman yang ditanggung masih relatif tinggi.

Analisis kesehatan koperasi dapat menggambarkan kinerja usaha koperasi baik yang berkaitan dengan aspek kuantitatif maupun kualitatif, dimana hasil dari analisis tersebut dapat menggambarkan nilai dari perusahaan koperasi. Semakin tinggi nilai perusahaan koperasi maka kemandirian koperasi semakin kuat, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung kepada anggota. Ketika anggota memperoleh manfaat langsung maka diharapkan partisipasi anggota semakin meningkat. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan kinerja usaha yang akan memperbesar nilai perusahaan koperasi beserta kesejahteraan anggotanya. Kaitan penilaian koperasi terhadap nilai perusahaan koperasi dapat tergambar sebagai berikut :



Gambar 4. Kinerja Usaha dengan Pendekatan Analisa Kesehatan Koperasi

PENUTUP

Untuk mengukur kinerja keuangan dari perusahaan Koperasi, terutama Koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam, akan mengacu pada ukuran kinerja kesehatan usaha simpan pinjam yang meliputi :

1. Aspek Permodalan
2. Kualitas aktiva Produktif
3. Aspek Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Keseluruhan dari pendekatan kinerja keuangan tersebut dapat diproksikan dengan *Return On Asset*, yang menggambarkan seberapa besar kemampuan koperasi dalam memperoleh keuntungan dari setiap satu rupiah dana yang digunakan (Agarwal *et al*, 2010)

Koperasi yang ingin tetap berkelanjutan harus beroperasi dengan cara yang dapat menghasilkan modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anggota melalui pemupukan modal sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Adekunle, Bamidele; Henson, Spencer J. (2007). *The Effect of Cooperative Thrift and Credit Societies on Personal Agency Belief: a Study of Entrepreneurs in Osun State, Nigeria.*
- Agarwal, Pankaj K.; Sinha, S.K. (2010). *Financial Performance of Microfinance Institutions of India, A Cross-sectional Study.*
- Bond, Jennifer Keeling. (2009). *Cooperative Financial Performance and Board of Director Characteristics: A Quantitative Investigation.*
- Desrochers, Martin; Fischer, Klaus P.; Mai/May. (2005). *The Power of Networks: Integration and Financial Cooperative Performance.*
- Dissanayake, D.M.N.S.W. (2012). *The Determinants of Return on Equity: Evidences from Sri Lankan Microfinance Institutions.*
- Ferrone, Caterina; Danilo, Tuccillo. *The Growth of Social Cooperatives: Focus on Financial Resource.*
- Ghalib, Asad Kamran. (2009). *Measuring The Impact of Microfinance Intervention : a Conceptual Framework of Social Impact Assesment by R. Srinivasan Self-Help Groups as Financial Institutions.*
- Hesse, Heiko; Čihák, Martin. (2007). *Cooperative Banks and Financial Stability.*
- Nilsson, Jerker. *Co-operative Organisational Models as Reflections of the Business Environments.*
- Peraturan Menteri KUKM No 6 Tahun 2016 tentang kesehatan koperasi.
- Peraturan Menteri KUKM No 10 Tahun 2015 tentang kelembagaan.
- Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Peraturan Menteri KUKM No 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi.
- Peraturan Menteri No 14 Tahun 2009 Tentang kesehatan Koperasi.
- Pollitt, Christopher. (2001). *Integrating Financial Management and Performance Management.*
- Subejo. *The Role of Social Capital in Economic Development: an Introduction to Study on Social Capital in Rural Indonesia.*
- Tucker, Michael; Miles, Gerard. (2002). *Financial Performance of Microfinance Institutions.*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Zeller, Manfred; Lapenu, Cécile; Greele, Martin. (2003). *Measuring Social Performance of Micro-Finance Institutions.*